

aspirasi

RADAR NEWS

Menuju Standar Akuntansi Internasional

STANDAR Akuntansi Keuangan berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur penyusunan laporan keuangan dalam suatu negara. Suatu Standar Akuntansi Keuangan akan disusun berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan hukum dari suatu negara. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut akan disusun oleh DSAK berdasarkan kondisi struktur ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang mendukung perkembangan Negara Indonesia. Sebab, laporan keuangan merupakan informasi pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap pemilik dana. Jadi laporan keuangan memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Untuk perusahaan go publik, publikasi laporan keuangan kepada publik merupakan suatu syarat yang wajib dilakukan. Perusahaan-perusahaan go publik tersebut dikoordinir oleh suatu bursa efek atau pasar modal di negara tersebut. Pasar modal di Indonesia disebut

Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin *listing* atau terdaftar di BEI, maka perusahaan tersebut harus mengikuti semua peraturan yang ditentukan oleh BEI dan lembaga yang disebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Bapepam-LK berada dibawah komando menteri keuangan Republik Indonesia. Bapepam-LK bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan di Indonesia. Bapepam-LK membantu menteri keuangan untuk mengatur proses pemodalannya yang terjadi di BEI melalui kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya. Kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, setiap



Oleh:
Riki Martusa
Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha dan Dosen Pengajar Akuntansi

bursa saham dan standar laporan keuangan suatu negara akan disusun berdasarkan kepentingan sosial, ekonomi, dan hukum negara tersebut.

Pada era globalisasi ini, proses perdagangan yang terjadi antar negara menjadi lebih mudah terjadi. Muncul beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia terdaftar di BEI. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut harus menerbitkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia serta sekaligus menerbitkan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku di negara asal perusahaan tersebut didirikan. Hal tersebut akan menimbulkan tambahan pengeluaran bagi para perusahaan multinasional tersebut.

Tambahan pengeluaran tersebut akan mengurangi profit yang dihasilkan oleh para perusahaan multinasional. Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di setiap negara menjadi hambatan bagi kelancaran perdagangan antar negara.

Beberapa negara seperti Belanda, Kanada, Australia, Meksiko, Jepang, Perancis, Selandia Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat berembuk untuk mencari solusi atas perbedaan Standar Akuntansi Keuangan tersebut. Lalu mereka menghasilkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IFRS merupakan sebuah Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang ditawarkan sebagai usulan untuk mengatasi perbedaan standar yang ada di setiap negara. IFRS memberikan usulan standar yang dapat diberlakukan di setiap negara. Masalah penambahan pengeluaran untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan dua atau beberapa standar yang berbeda dapat terpecahkan jika IFRS dapat diterima menjadi standar di semua negara. Namun setiap negara tetap

mempunyai struktur ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang khas sesuai dengan tujuan negara tersebut dibentuk. Jadi implementasi IFRS di setiap negara pasti membutuhkan penyesuaian dengan kondisi yang sudah berlangsung di negara tersebut.

Kendala implementasi IFRS juga terjadi di Indonesia sebagai negara yang sudah menandatangani diri untuk melakukan *full adoption* pada tahun 2012. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sudah mengadopsi beberapa standar dalam IFRS. DSAK sudah memutuskan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam implementasi IFRS bersama beberapa negara Eropa lainnya. Walaupun pada saat ini Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memuat juga kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Standar akuntansi syariah saat ini sudah dipakai oleh mayoritas perbankan di Indonesia. Jadi standar akuntansi syariah ini sudah melekat pada struktur ekonomi Indonesia pada saat ini. Standar akuntansi syariah juga berkaitan dengan keyakinan agama Islam di Indonesia.

Hal lain yang khas di Indonesia adalah pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan yang mempunyai tujuan berbeda dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan memberikan informasi pertanggungjawaban kepada investor dan kreditor, sedangkan peraturan perpajakan mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak di negara Indonesia. Jadi implementasi IFRS membutuhkan harmonisasi dengan peraturan perpajakan dan standar akuntansi syariah. Jika Indonesia ingin berkiprah dalam kompetisi global, maka implementasi IFRS wajib dilakukan. Jadi pelaksanaan IFRS akan dilakukan berbarengan dengan standar akuntansi syariah serta peraturan perpajakan di Indonesia. Pemerintah akan membuat kebijakan harmonisasi yang berpegang pada kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

Pendapat saya IFRS harus tetap diadopsi penuh oleh negara Indonesia dengan pertimbangan banyaknya modal asing atau perusahaan asing yang memberikan sumber devisa bagi negara. Namun standar akuntansi syariah dan peraturan perpajakan pun memberikan kontribusi besar bagi stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaan IFRS, standar akuntansi syariah dan peraturan perpajakan harus dilakukan berdampingan sesuai dengan *cost* dan *benefitnya* bagi stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan hukum Negara Indonesia. (*)